



## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH (Studi Kasus Pasar Sungai Turak)

Linda<sup>1</sup>, Irza Setiawan<sup>2</sup>, Saidah Hasbiyah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [lindaamuy1212@gmail.com](mailto:lindaamuy1212@gmail.com)

### ABSTRAK

Pasar Sungai Turak merupakan salah satu pasar pemerintah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya berada di Kecamatan Amuntai Utara. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan menginterpretasikan sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah kurang baik, indikator yang kurang baik, yaitu Kejelasan Standar, Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Infrastruktur, Sumber Daya Finansial, Norma-norma, Pola-pola Hubungan, Kondisi Sosial, Pemahaman Pelaksana. sedangkan indikator yang sudah cukup baik yaitu Komunikasi Dengan Instansi Lain, Koordinasi Dengan Instansi Lain, Kondisi Ekonomi, dan Kondisi Politik, Struktur Birokrasi, Tanggapan Pelaksana dan Tingkat Komitmen. Faktor Penghambat yaitu Masih Adanya Pedagang Di Bahu Jalan, Sarana Dan Prasarana Yang Masih Kurang Memadai, Dan Kurangnya Petugas Lapangan. Faktor yang mendukung yaitu Adanya komunikasi dengan instansi lain, Adanya Koordinasi Dengan Instansi Lain, Adanya Peran Struktur Birokrasi, Dan Kondisi Ekonomi Pasar Yang Masih Stabil.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan, Pasar

### ABSTRACT

*Sungai Turak Market is one of the government markets in North Hulu Sungai Regency, precisely in North Amuntai District. The aim of this research is to find out, analyze and interpret the extent of the implementation of North Hulu Sungai Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Government Market Management and the factors that influence it. The results of the research show that it can be concluded that the implementation of North Hulu Sungai Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Government Market Management is not good, the indicators are not good, namely Clarity of Standards, Policy Objectives, Human Resources, Infrastructure Resources, Financial Resources, Norms, Relationship Patterns, Social Conditions, Understanding of Implementers. while the indicators that are quite good are Communication with Other Agencies, Coordination with Other Agencies, Economic Conditions and Political Conditions, Bureaucratic Structure, Implementer Response and Level of Commitment. Inhibiting factors include the existence of traders on the side of the road, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of field officers. Supporting factors are the existence of communication with other agencies, the existence of coordination with other agencies, the role of bureaucratic structures, and market economic conditions that are still stable.*

**Keywords:** Implementation, Regulations, Markets

### PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya kepentingan konsumen di satu sisi, dengan kepentingan produsen lain. Oleh karena itu, pasar mempunyai banyak fungsi bagi pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, maupun pemerintah. Pasar berfungsi antara lain sebagai sumber informasi bagi konsumen, produsen bahkan juga pemerintah. Dengan demikian, pasar mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis bagi pelaku bisnis (produsen) dan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian pasar juga dapat dilihat secara sempit dan luas, secara pengertian sempit pasar adalah

tempat berkumpul dan bertemunya para penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) di suatu lokasi tertentu. Sedangkan pengertian secara luas pasar adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, merupakan sumber informasi bagi pelaku ekonomi, serta juga merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun produsen (Henry Faizal Noor, 2015:128-129)

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa "Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, supermarket, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya". Adapun pada Bab 1 Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa "Pasar Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan lapak/tenda" berdasarkan pasal tersebut Pasar Sungai Turak adalah termasuk pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian lainnya bisa berarti proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah melakukan berbagai upaya atau cara dalam menangani masalah pengelolaan pasar. Pengelolaan atau penataan pasar merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam penataan pasar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar yang menjadi pusat perhatian peneliti yaitu Pasar Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara. Pasar tersebut terletak tepat di antara pertigaan jalan, Desa Pasar Sungai Turak yang mana terlihat para pedagang dengan berbagai jenis dagangan sayur, ikan, buah, dan keperluan dapur lainnya di sepanjang tepi jalan dan menggunakan jalan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Pasar Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara diantaranya:

1. Masih banyak pedagang yang berjualan menggunakan bahu jalan yang menimbulkan adanya kemacetan sehingga menyebabkan terganggunya pengendara jalan lainnya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 21 ayat (1) Poin b yang berbunyi "Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya"
2. Lahan parkir yang sempit akibatnya menimbulkan banyaknya parkir liar disekitar lingkungan pasar, tidak adanya pos keamanan pasar dan kantor pasar. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PASAR DAERAH Bagian Kesatu Pasal 8 Perlindungan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
3. Masih banyaknya pedagang yang tidak mengetahui dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan informan secara *purposive sampling* berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, tampilan data, serta menggambar dan memverifikasi kesimpulan

## PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi yaitu

### 1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

#### a. Kejelasan Standar

Sebuah kebijakan harus mempunyai standar dan sasaran yang jelas agar dapat terlaksana dengan baik karena apabila tidak ada standar dan sasaran yang jelas akan mudah menimbulkan kesalahan-kesalahan diantara para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan Kejelasan Standar kebijakan kurang baik karena masih ada pedagang yang berjualan di bahu-bahu jalan dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham. Hal ini disebabkan karena jarang dilaksanakan sosialisasi.

Hal ini belum sesuai dengan Teori Van Metter Dan Van Horn (Subarsono 2013,99-101) yang mengatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

#### b. Tujuan Kebijakan

Sebuah kebijakan harus mempunyai tujuan agar dapat terlaksana dengan baik. Karena dengan tujuan dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak) mengenai Tujuan kebijakan kurang baik karena tidak sesuai dengan Tujuan Pengelolaan pada Pasal 3, karena masih ada pedagang yang berjualan tidak mematuhi aturan seperti berjualan di bahu jalan, membuang sampah sembarangan, serta menyebabkan ketidaknyamanan pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli. Karena jarang adanya dilakukan penataan petugas lapangan sehingga pedagang sembarangan untuk membuka lapak dipinggir jalan Hal ini membuat pasar tidak bersih, aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil Observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak) mengenai tujuan kebijakan kurang baik karena tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan pada Pasal 3, karena masih ada pedagang yang melanggar tata tertib berjualan tidak mematuhi aturan seperti berjualan di bahu jalan yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan sehingga terjadi kemacetan, membuang sampah

sembarangan yang menyebabkan timbulnya bau tidak sedap, serta menyebabkan ketidaknyamanan pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli. Karena jarang adanya dilakukan penataan petugas lapangan sehingga pedagang sembarangan untuk membuka lapak dipinggir jalan. Hal ini membuat pasar tidak bersih, aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dilapangan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak) mengenai tujuan kebijakan kurang baik karena tidak sesuai dengan tujuan Pengelolaan pada Pasal 3, karena masih ada pedagang yang melanggar tata tertib berjualan tidak mematuhi aturan seperti berjualan dibahu jalan yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan sehingga terjadi kemacetan, membuang sampah sembarangan yang menyebabkan timbulnya bau tidak sedap, serta menyebabkan ketidaknyamanan pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli. Karena jarang adanya dilakukan penataan petugas lapangan sehingga pedagang sembarangan untuk membuka lapak dipinggir jalan. Hal ini membuat pasar tidak bersih, aman dan nyaman.

Hal ini belum sesuai dengan Teori Van Meter Dan Van Horn (Subarsono 2013 : 99-101) dalam hal ukuran mengenai implementasi, salah satunya adalah standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi

## **b. Sumber Daya**

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Dalam suatu Implementasi kebijakan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena mereka selalu implementator yang dapat mensukseskan ataupun menggagalkan pelaksanaan sebuah kebijakan mereka harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh dinas yang berkaitan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwa sumber daya manusia kurang baik, karena sumber daya manusia pengelolaan pasar yaitu kebersihan 1 orang dan keamanan 1 orang, Kepolisian dan TNI kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Hal ini belum sesuai dengan Teori Van Meter dan Van Horn (subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

### **b. Sumber Daya Infrastruktur**

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu pengelolaan pasar dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi dapat disimpulkan sumber daya infrastruktur kurang baik karena tidak adanya parkir khusus sehingga banyak parkir liar disekitar bahu-bahu jalan dan di pinggir lapak-lapak pedagang kaki lima, bak pembuangan sampah yang kurang memadai sehingga membuat sampah berserakan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, wc yang airnya tidak ada, tidak adanya kantor keamanan pasar dan kantor pasar serta tidak tersedianya sarana pemadam kebakaran, lapak pedagang kaki lima yang kurang memadai yang hanya beralaskan seadanya.

Hal ini belum sesuai dengan Teori Van Meter Dan Van Horn (Subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya Infrastruktur. Karena belum memadai nya sumber daya infrastruktur sesuai dengan yang tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah.

c. Sumber Daya Finansial

Sumber Daya finansial merupakan Sumber daya merupakan dana (uang). Ketika sumber daya digunakan dengan efektif dan efisien maka dapat dipastikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak) dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial kurang baik karena terbatasnya anggaran untuk melakukan perbaikan secara optimal seperti perbaikan pada bangunan-bangunan berupa los yang atapnya bocor dan lapak-lapak pedagang kaki lima yang belum memadai yang memakai alas seadanya, tempat parkir khusus juga belum ada, dan WC yang tidak ada airnya.

Hal ini belum sesuai dengan Teori Van Meter Dan Van Horn (Subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

**3. Komunikasi Antarorganisasi dan penguatan aktivitas**

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

a. Komunikasi Dengan Instansi Lain

Komunikasi dengan instansi lain merupakan metode dalam salah satu penguatan aktivitas dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa mengenai Komunikasi dengan instansi lain cukup baik karena terjalinnya komunikasi yang baik antar badan pelaksana sehingga memudahkan dalam pengimplementasian peraturan daerah.

Hal ini sesuai dengan Teori Van Meter Dan Van Horn (subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan komunikasi dengan instansi lain dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

b. Koordinasi Dengan Instansi Lain

Koordinasi dengan instansi lain merupakan upaya sinergis antara berbagai pihak atau instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan yang baik dan konsisten dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa mengenai Koordinasi dengan instansi lain cukup baik karena terjalinnya kerja sama, dan saling berbagi informasi yang baik antar dinas maupun instansi pelaksana sehingga memudahkan dalam pengimplementasian peraturan daerah.

Hal ini sudah sesuai dengan Teori Van Meter Dan Van Horn (subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

#### 4. Karakteristik Agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

##### a. Struktur Birokrasi

Dalam suatu implementasi kebijakan agar tercapai keberhasilan yang maksimal, harus mengetahui karakteristik dari agen pelaksana yaitu struktur birokrasi yang terjadi dalam birokrasi, ini akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan struktur birokrasi cukup baik karena pengelolaan struktur birokrasi sudah terstruktur cukup jelas diantaranya ada Pembina/Pengolah yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten II Perekonomian, Kepala Dinas, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala UPT pasar dan Staf UPT pasar.

Hal ini sesuai dengan Teori Van Meter Dan Van Horn (Subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi.

##### b. Norma Norma

Dalam suatu implementasi kebijakan agar tercapai keberhasilan yang maksimal, harus mengetahui karakteristik dari agen pelaksana yaitu norma-norma yang terjadi dalam birokrasi, ini akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dan data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa norma-norma kurang baik karena masih ada pelaksana yang melanggar peraturan dalam hal penataan pasar seperti para pedagang yang berjualan di bahu bahu jalan, pembeli yang parkir liar, petugas yang kurang berpartisipasi dalam suatu pengelolaan dan penataan pasar.

Hal ini belum sesuai dengan teori menurut Van Metter dan Van Horn (Subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

##### c. Pola pola hubungan

Dalam suatu implementasi kebijakan agar tercapai keberhasilan yang maksimal, harus mengetahui karakteristik dari agen pelaksana yaitu pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, ini akan mempengaruhi implementasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan pola hubungan kurang baik karena hubungan interaksi antara pihak dinas terkait dengan pedagang maupun pembeli/masyarakat tidak baik. Hal ini disebabkan jarang adanya sosialisasi antara pihak dinas terkait sehingga jarang adanya interaksi dengan pelaksana kebijakan.

Hal ini belum sesuai dengan teori menurut Van Metter dan Van Horn (Subarsono:2013:99-101) pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

#### 5. Kondisi sosial, Ekonomi dan Politik

Sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik..

##### a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi suatu program.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan kondisi sosial kurang baik, karena kelompok antar pedagang bisa terjadi perselisihan bisa memperlmasalahkan lapak yang melampaui batas dan juga lapak-lapak para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan untuk berdagang hal itu disebabkan tidak teraturnya penataan lapak-lapak sehingga dapat terjadi perselisihan antar pedagang.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn (Subarsono:2013:99-101) mengatakan bahwa Variabel ini mencakup kondisi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan kondisi ekonomi sudah baik karena kondisi ekonomi sudah mendukung akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah.

Hal ini sudah sesuai dengan Teori Van Metter dan Van Horn (Subarsono 2013:99-101) mengatakan bahwa Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Kondisi Politik

Kondisi politik dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan atau jalannya implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dan data dokumentasi dapat disimpulkan kondisi politik sudah baik karena keadaan politik sudah mendukung dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah.

Hal ini sudah sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn (Subarsono 2013:99-101) mengatakan bahwa variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan..

## 6. Disposisi Implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

a. Tanggapan Pelaksana

Pelaksanaan Kebijakan perlu adanya respon yang baik dari para implementor terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan tanggapan pelaksana cukup baik karena respon dari para implementor cukup baik sehingga hal ini memicu keberhasilan dalam mencapai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hal ini sudah sesuai dengan teori menurut Van Metter dan Horn (Subarsono, 2013:99-101) mengatakan bahwa Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

b. Pemahaman Pelaksana

Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar perlu adanya pemahaman dari para para implementor terhadap kebijakan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan pemahaman pelaksana kurang baik karena pedagang dan pembeli masih kurang paham terhadap Peraturan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 banyak pedagang maupun pembeli yang memarkirkan kendaraannya di sekitar pasar atau parkir liar.

Hal ini tidak sesuai dengan teori menurut Van Metter Dan Van Horn (Subarsono, 2013:99-101), (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.

c. **Tingkat Komitmen**

Pelaksanaan sebuah kebijakan perlu adanya komitmen yang kuat dan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan tingkat komitmen cukup baik karena petugas pelaksana cukup memiliki komitmen untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah

Hal ini sudah sesuai dengan teori menurut Van Metter dan Van Horn (Subarsono 2013:99-101) (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor..

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak)

## 1. Faktor Pendukung

### a. Adanya Komunikasi Dengan Instansi Lain

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa mengenai Komunikasi dengan instansi lain cukup baik karena terjalinnya komunikasi yang baik antar badan pelaksana sehingga memudahkan dalam pengimplementasian peraturan daerah.

Hal ini sesuai dengan Teori Van Meter Dan Van Horn (subarsono: 2013:99-101) yang mengemukakan bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan komunikasi dengan instansi lain dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

### b. Adanya Koordinasi Dengan Instansi Lain

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa mengenai Koordinasi dengan instansi lain cukup baik karena terjalinnya kerja sama, dan saling berbagi informasi yang baik antar dinas maupun instansi pelaksana sehingga memudahkan dalam pengimplementasian peraturan daerah seperti dengan Satpol-pp dan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### c. Adanya Peran Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan struktur birokrasi cukup baik karena pengelolaan struktur birokrasi sudah terstruktur cukup jelas diantaranya ada Pembina/Pengolah yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten II Perekonomian, Kepala Dinas, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala UPT pasar dan Staf UPT pasar. Serta perlu adanya manjerial data suatu pengelolaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak).

### d. Kondisi Ekonomi Pasar Yang Masih Stabil

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi sudah baik karena kondisi ekonomi sudah mendukung akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Masih Adanya Pedagang di Bahu Jalan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan masih ada pedagang yang berjualan di bahu-bahu jalan dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak tahu dan tidak

paham. Hal ini disebabkan karena jarang dilaksanakan sosialisasi dan tidak adanya plang atau spanduk.

## **b. Sarana Dan Prasarananya Yang Masih Kurang Memadai**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya parkir khusus sehingga banyak parkir liar disekitar bahu-bahu jalan dan di pinggir lapak-lapak pedagang kaki lima, bak pembuangan sampah yang kurang memadai sehingga membuat sampah berserakan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, wc yang airnya tidak ada, tidak adanya kantor keamanan pasar dan kantor pasar serta tidak tersedianya sarana pemadam kebakaran, lapak pedagang kaki lima yang kurang memadai yang hanya beralaskan seadanya.

## **c. Kurangnya Petugas Lapangan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak) mengenai mengenai sumber daya manusia kurang baik, karena sumber daya manusia pengelolaan pasar yaitu kebersihan 1 orang dan keamanan 1 orang, kepolisian dan TNI kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya seperti mengatur lalu lintas dan keamanan sehingga menimbulkan kemacetan dan menyebabkan terganggunya pengguna jalan tapi kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli petugas tersebut jarang melakukan kebersihan dan keamanan.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah kurang baik, indikator yang kurang baik, yaitu Kejelasan Standar, Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Infrastruktur, Sumber Daya Finansial, Norma-norma, Pola-pola Hubungan, Kondisi Sosial, Pemahaman Pelaksana. sedangkan indikator yang sudah cukup baik yaitu Komunikasi Dengan Instansi Lain, Koordinasi Dengan Instansi Lain, Kondisi Ekonomi, dan Kondisi Politik, Struktur Birokrasi, Tanggapan Pelaksana dan Tingkat Komitmen. Faktor Penghambat yaitu Masih Adanya Pedagang Di Bahu Jalan, Sarana Dan Prasarana Yang Masih Kurang Memadai, Dan Kurangnya Petugas Lapangan. Faktor yang mendukung yaitu Adanya komunikasi dengan instansi lain, Adanya Koordinasi Dengan Instansi Lain, Adanya Peran Struktur Birokrasi, Dan Kondisi Ekonomi Pasar Yang Masih Stabil.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Alfa Beta.
- Anggara, D. sahya (2014) 'Kebijakan Publik', *Kebijakan Publik* [Preprint], (1993).
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.S. (2014) *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.
- Subarsono (2011) 'Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi', *Pustaka Pelajar*, 1(2).
- Tauiqururokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik